

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan demokrasi yang dialami Indonesia mulai sejak diterapkannya Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, sampai kepada Demokrasi Pancasila merupakan suatu perjalanan dalam rangka mencapai demokratisasi yang ideal bagi bangsa Indonesia. Demokrasi menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani, demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan).¹ Maka dalam pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki peranan penting dalam urusan negara. Hal ini memberikan suatu keleluasaan bagi rakyat Indonesia untuk memberikan partisipasinya dalam kegiatan politik. Seperti terwujud dalam UUD 1945 pasal 28, bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang”.² Artinya, negara menjamin hak kolektifitas (hak bersama-sama) dalam melakukan kegiatan kolektif termasuk kegiatan politik. Namun pada kenyataannya untuk mencapai suatu negara yang demokratis masih terasa tidak mudah untuk diwujudkan di Indonesia, karena demokrasi sendiri menuntut banyak aspek untuk mencapai suatu demokrasi yang ideal bagi suatu bangsa.

¹Miriam Budiarjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Umum, 2008, hal.105

²Perpustakaan Nasional; UUD 1945 Negara Republik Indonesia Dalam Satu Naskah (Amandemen I-IV), Jakarta ;Pustaka Nasional, 2010.hal.26

Di negara Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, proses demokratisasi telah terlihat dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan berpendapat oleh setiap warga negara yang berarti bahwa warga negara berhak untuk mengeluarkan pendapat, masukan, kritikan dan saran serta memberi intervensi terhadap perjalanan negara.

Sistem demokrasi yang sangat dikenal dengan kebebasan berpendapatnya menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu ciri yang dituntut untuk wajib ada dalam sebuah negara yang demokratis. Pemilihan umum tersebut dilaksanakan secara periodik dengan rentang waktu yang diatur secara jelas dengan tingkatan pemilihan yang tidak hanya dilakukan dalam lingkungan pemerintah pusat yang mengurus masalah negara tetapi juga termasuk kepada lingkungan pemerintah daerah yang mengurus masalah pemerintahan di tingkat local dan daerah. Pemilihan umum menjadi salah satu sarana yang dibuat oleh pemerintah agar rakyat ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan yaitu dengan cara memilih dan menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga merupakan wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk kedalam lingkaran *elite* politik, baik itu di tingkat nasional ataupun ditingkat daerah.³

Oleh karena saat ini pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat atau presiden dan wakilnya yang akan

³ Andri Rusta. 2005. *Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilu 2005 di Kota Padang*. Skripsi. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Sehingga diperlukan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang akan berpengaruh dalam kegiatan pemilihan umum tersebut. Wujud partisipasi masyarakat melalui pemilu tidak hanya sebagai melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara tetapi juga menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Negara yang menganut sistem demokrasi menjadikan pemilihan umum sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap akan mencerminkan secara akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian pemilihan umum bukan dijadikan satu- satunya tolak ukur dan perlu di lengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan dan aktivitas yang bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai politik, *lobbying*, dan sebagainya.⁴

Kriteria untuk mencapai suatu pemerintahan yang demokratis dan ideal selalu menuntut berbagai hal. Salah satu yang menjadi indikator suatu pemerintahan yang demokratis mampu kita lihat dari partisipasi politik masyarakat tersebut. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.⁵ Partisipasi politik masyarakat adalah aspek penting dari demokratisasi di dalam sebuah negara. Unsur demokrasi itu sendiri ditentukan oleh

⁴ Miriam Budiarmo. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Utama. Hlm 461.

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widya Sarana, 1992. hal.140

bagaimana kesadaran dari warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Ini menjadi satu hal yang penting di dalam konteks pemerintahan demokrasi karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pemerintahan adalah aktor yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan bagi dirinya. Kesadaran inilah yang perlu diwujudkan dalam rangka mewujudkan partisipasi politik untuk mempengaruhi kebijakan dalam pemerintahan.

Partisipasi berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasi politiknya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sikap politik masyarakat. Sikap politik merupakan reaksi terhadap penghayatan objek tertentu yang bersifat politik. Munculnya sikap politik tertentu akan dapat diperkirakan perilaku politik apa yang sekiranya akan muncul.⁶ Misalnya, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan pajak merupakan suatu sikap politik. Dengan adanya ketidaksetujuan tersebut, perilaku yang diperkirakan akan muncul adalah pernyataan keberatan, protes, ataupun unjuk rasa. Perilaku politik merupakan hasil dari manifestasi sikap politik. Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap politik masyarakat adalah tingkat status sosial ekonominya. Disamping faktor tersebut, adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor komunikasi politik, tingkat kesadaran politik, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan,

⁶Sudjino Sastroatmodjo, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.hal.4

kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik, lingkungan, nilai budaya, dan lain-lain.⁷

Partisipasi politik sebagai perwujudan dari hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.⁸

Fenomena yang berbeda muncul dalam pemilihan Umum tahun 2019 tentang tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia diberbagai daerah/wilayah dalam proses demokrasi. Halini dikarenakan pelaksanaan [emilihan umum yang dilakukan cukup unik dan berbeda dari pelaksanaan pemilihan umum tahun-tahun

⁷Sudjino Sastroatmodjo, op.cit., hal. 7

⁸ Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348. Hal.330

sebelumnya dimana pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif (DPRD RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) diberlakukan secara serentak.

Partisipasi politik dengan kesadaran politik memiliki kaitan erat dimana wujud dari kesadaran politik adalah partisipasi politik dalam pemilihan umum. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Maka dari itu terciptalah social control yang berasal dari people power yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Milbarth berpendapat bahwa kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik.⁹ Melalui tingkatan kesadaran politik akan menciptakan suatu kontrol dan pengawasan yang lebih baik dalam tingkatan demokrasi di Indonesia yaitu Depending Demokrasi, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kesadaran

⁹*Ibid.*, hlm. 15-26.

politik maka semakin sadar masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum untuk menggunakan hak serta menjalankan kewajiban. Ini membuktikan bahwa kesadaran akan partisipasi politik merupakan aspek penting dan syarat utama yang harus dipenuhi dengan membangun tatanan Negara yang demokratis.

Partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh kesadaran politik individu itu sendiri. seperti yang dikemukakan oleh Jeffry M. Paige bahwa tinggi rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh variabel kesadaran politik.¹⁰ Beberapa indikator yang dapat menganalisis kesadaran politik seseorang menurut Jeffry M. Paige yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku (tindakan). Menyadari akan posisi diri sebagai warga negara dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan awal dari kesadaran politik sehingga ia akan memenuhi kewajibannya untuk ikut serta terlibat dalam aktivitas politik seperti halnya pemilu. Dengan begitu akan memunculkan partisipasi politik yang semakin meningkat jika setiap individu memiliki kesadaran untuk terlibat dalam proses politik dengan tujuan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara.

Kesadaran politik yang dibentuk melalui Pemilu serentak 2019 adalah salah satu faktor pendukung partisipasi politik masyarakat Indonesia. Kesadaran politik erat hubungannya dengan partisipasi pemilih di suatu Negara yang demokratis. Wujud dari partisipasi politik itu sendiri merupakan partisipasi memilih pada hari pemilu yang akan menentukan kualitas partisipasi politik apakah masyarakat telah

¹⁰ Ramlan, Surbakti. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Jakarta : Rineka Cipta.

memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih.

Pemilihan umum legislatif yang merupakan bentuk dari partisipasi politik yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat ambil bagian dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerahnya nantinya. Realitas yang terjadi di Kota Pekanbaru pada pemilihan umum legislatif meningkat cukup tinggi, pada tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat melalui pemilihan umum legislatif sebesar 58,12% sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2019 meningkat cukup signifikan sebesar 93,97%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan terhadap kesadaran politik sehingga pemilihan umum dalam rangka sebagai wadah partisipasi politik masyarakat dapat mengukur demokratisnya suatu bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian dilakukan dalam mengukur tingkatan hubungan terhadap kasus pemilihan umum legislatif di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sendiri terdiri dari 12 kecamatan yakni Kecamatan Pekanbaru Kota, Rumbai, Payung Sekaki, Sukajadi, Rumbai Pesisir, Senapelan, Tampan, Marpoyan Damai, Lima Puluh, dan Bukit Raya. Mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa bidang, yaitu Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, Industri, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Jasa, dan lainnya. Masyarakat di Kota Pekanbaru memiliki mata pencaharian utama yaitu perdagangan yang mencapai 40,25%, bidang jasa sebanyak 26,02%, bidang konstruksi sebanyak 10,62%, bidang industry sebanyak

5,56%, bidang keuangan sebanyak 5,97%, bidang transportasi dan komunikasi sebanyak 5,48%, bidang pertanian sebanyak 4,70% yang mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta bidang lainnya sebanyak 1,40%.¹¹

Keadaan masyarakat yang berfokus dengan pekerja dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf status sosial ekonomi. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung kurang memenuhi aspirasi masyarakat dalam kegiatan partisipasi politik, terkhusus pada kegiatan pemilu legislatif yang diselenggarakan tahun 2019 lalu. Kegiatan pemilu legislatif yang berlangsung menjadi sumber keramaian di kota Pekanbaru. Beberapa masyarakat, justru mengambil kesempatan berdagang di tengah keramaian untuk mendapat penghasilan yang lebih di hari pemilihan umum. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai wiraswasta yang tidak tergantung hari libur nasional, melainkan bergantung pada lingkungan. Dengan keberagaman status sosial ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru, akan menjadi hal menarik untuk mengukur pengaruhnya terhadap partisipasi politik khususnya pemilihan umum legislatif.

Miriam Budiardjo dalam tulisannya mengenai partisipasi dan partai politik mendefinisikan partisipasi politik secara umum sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)¹².

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru diakses pada 04 September 2022

¹² Miriam Budiardjo (ed), Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT. Gramedia, 1982, halaman 1

Penelitian dilakukan pada Kota Pekanbaru melalui pengukuran partisipasi politik masyarakatnya dengan pemilihan umum legislatif pada tahun 2019. Peneliti mengambil lokasi penelitian Kota Pekanbaru dikarenakan Kota Pekanbaru menduduki peringkat pertama sebagai Kabupaten/Kota yang memiliki partisipasi politik paling tinggi dalam pemilu 2019 di Provinsi Riau. Adapun data sebaran jumlah pemilih di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Politik di Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

No.	Kabupaten /Kota	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih DPT	Tingkat Partisipasi Politik
1	Pekanbaru	303.118	227.442	74,53%
2	Dumai	213.925	153.706	71,62%
3	Indragiri hulu	291.046	196.123	65,84%
4	Rokan hilir	453.715	269.786	65,15%
5	Kuantan Singingi	334.948	195.598	63,32%
6	Siak	395.537	246.973	63,17%
7	Pelalawan	324.566	203.277	62,25%
8	Kampar	191.009	114.715	61,63%
9	Indragiri hilir	102.403	64.394	61,44%
10	Rokan hulu	203.054	115.678	58,20%
11	Bengkalis	242.216	116.944	53,76%
12	Kepulauan Meranti	291.766	145.926	50,22%
	Total	3.347.303	2.050.562	74,53%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2019

Dari 303.118 jiwa yang terdaftar dalam DPT di Kota Pekanbaru, jumlah terbanyak yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu adalah Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan tersebut memiliki 26.840 jiwa dalam DPT dan 21.254 jiwa yang menggunakan hak pilihnya, serta tingkat prosentase partisipasi

sebanyak 79,18%. Untuk lebih jelas, berikut data tingkat partisipasi politik Kota Pekanbaru:

Tabel 1. 2 Tingkat Partisipasi Politik Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

No.	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Plih DPT	Tingkat Partisipasi
1	Marpoyan Damai	26.84	21.254	79,18%
2	Senapelan	25.911	20.231	77,61%
3	Payung Sekaki	18.632	14.451	77,42%
4	Sukajadi	22.661	16.768	76,02%
5	Rumbai	24.624	18.366	75,61%
6	Tenayan Raya	25.965	19.664	74,90%
7	Sail	28.331	20.358	73,50%
8	Bukit Raya	27.242	19.732	72,43%
9	Pekanbaru Kota	27.536	19.595	71,89%
10	Tampar	26.451	18.568	71,21%
11	Rumbai Pesisir	20.821	14.414	69,23%
12	Lima Puluh	29.125	19.532	67,01%
	Jumlah	303.118	227.442	74,53%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 2019

Kota Pekanbaru merupakan Kota yang memiliki tingkat partisipasi politik cukup stabil. Pada PilGub Provinsi Riau 2019 Kota Pekanbaru memiliki angka partisipasi politik yang hampir sama dengan sekarang yakni 74,92%. Sedangkan pada pemilu 2014, partisipasinya adalah 67,68% yang berarti tingkat partisipasi masyarakat mengalami peningkatan pada pemilu 2019. Maka dapat diketahui bahwa pada pemilu 2014 partisipasi masyarakat cukup rendah, sedangkan pada pilkada 2018 meningkat cukup banyak, dan pada pemilu 2019 angka partisipasinya stabil pada angka 74%.

Secara umum, Pemilu merupakan sebuah ajang untuk memilih para

pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu merupakan sebuah sarana pengamalan nilai-nilai demokrasi. Pemilu merupakan inti dari pergantian kekuasaan, ciri suatu negara demokrasi. Pemilu merupakan sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah. Karena, tujuan utama kita berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Dengan adanya pemilu, kita dapat mengukur seberapa tinggi respon masyarakat terhadap acara tersebut, sehingga dapat diketahui nilai partisipasi dari suatu masyarakat.

Tingginya angka partisipasi politik merupakan bentuk kepedulian masyarakat dan kesadaran politik terhadap pentingnya terlibat dalam urusan politik. Bentuk partisipasi yang paling mudah dilaksanakan oleh masyarakat adalah mengikuti kegiatan pemilu dan pilkada. Partisipasi politik dianggap sebagai sebuah tolak ukur seberapa tingginya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membuat sebuah kebijakan politik. Partisipasi politik merupakan segala bentuk kegiatan seseorang atau pun sekelompok orang dalam kehidupan politik.¹³

Berdasarkan hasil temuan data di awal, meningkatnya partisipasi pemilihan legislatif 2019 tidak terlepas dari keadaan kota Pekanbaru yang notabene nya adalah kota Pendidikan yang didukung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

¹³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.367.

Tabel 1. 3 Tingkat Pendidikan Pengguna Hak Pilih DPT Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tinggi (S1-S3)	75.268	33%
2	Sedang (SMA)	82.587	36%
3	Rendah (Tidak Tamat SD- SMP)	69.587	31%
	Jumlah	227.442	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 2019

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pengguna hak pilih DPT Kota Pekanbaru pada pemilu tahun 2019 di dominasi oleh tingkat pendidikan sedang (SMA) dengan persentase 36% yang diikuti tingkat pendidikan tinggi (S1-S3) dengan persentase 33% dan tingkat pendidikan rendah (SD-SMP) dengan persentase 31%. Sehingga dengan ini diketahui bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Kota Pekanbaru telah merasakan pendidikan yang artinya Kota Pekanbaru memiliki masyarakat dengan kualitas pendidikan yang baik. Peneliti berasumsi bahwa dengan kualitas pendidikan yang tinggi melahirkan masyarakat yang peduli dan sadar akan politik.

Kesadaran tersebut muncul salah satu nya dikarenakan dengan adanya aspek pendidikan atau pengetahuan ini akan menghasilkan perasaan emosional seseorang terhadap sistem politik, perasaan ini berisi harapan harapan masyarakat terhadap bagaimana mereka akan di perlakukan oleh pemerintah dan harapan mereka pada periode yang akan datang. Bentuk kesadaran bisa dilihat tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri dalam proses pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Tingkat Partisipasi Masyarakat Provinsi Riau Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

No.	Dapil	Kota/Kabupaten	Persentase (%)
1	Dapil 1	Pekanbaru	93,97
2	Dapil 2	Kampar	86,57
3	Dapil 3	Rokan Hulu	87,72
4	Dapil 4	Rokan Hilir	79,96
5	Dapil 5	Dumai, Bengkalis, Meranti	82,40
6	Dapil 6	Siak, Pelalawan	86,59
7	Dapil 7	Indragiri Hilir	74,45
8	Dapil 8	Indragiri Hulu, Kuantan Singigi	83,77

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif Provinsi Riau tahun 2019, jika dibandingkan antar delapan dapil di Riau, maka partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru (dapil 1) menempati posisi tingkat partisipasi masyarakat tertinggi yakni 93,97%. Sebaliknya dapil tujuh yaitu Kabupaten Indragiri Hilir menempati posisi paling bawah (74,45%). Secara berurutan, tingkat partisipasi tertinggi ke terendah adalah pertama Dapil Riau 1 (93,97%), kedua Dapil Riau 3 (87,72%), ketiga Dapil Riau 6 (86,59%), keempat Dapil Riau 2 (86,57%), kelima Dapil Riau 8 (83,77%), keenam Dapil Riau 5 (82,40%), ketujuh Dapil Riau 4 (79,96%), dan terakhir kedelapan Dapil Riau 8 (74,45%). Oleh karena itu bentuk kesadaran politik juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat ikut aktif dalam sistem politik di daerah itu sendiri, seperti halnya Kota Pekanbaru masyarakat cukup antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan politik, salah satunya yaitu kegiatan pemilihan¹⁴.

¹⁴Susanto, N. N. (2019). *Peta Partisipasi Pemilih Riau Pada Pemilu 2019*. Journal KPU

Bentuk kesadaran politik di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memilih ataupun mempergunakan hak pilihnya dan ikut serta dalam kegiatan kampanye. Dalam hal pemilihan umum legislative tahun 2019 masyarakat Kota Pekanbaru lebih antusias mempergunakan hak pilih mereka dikarenakan pemilihan umum yang diadakan adalah pemilihan umum serentak dengan persentase penggunaan hak pilih mencapai 93,97%. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada pemilihan umum legislative tahun 2014 yang hanya memperoleh persentase penggunaan hak pilih sebesar 58,12%¹⁵.

Dinamika politik tahun 2019 yang terjadi sangat intens baik pada level nasional maupun daerah memberikan dampak positif terhadap kesadaran politik masyarakat kota Pekanbaru. Dampak positif ini dilihat dari masyarakat yang ikut berperan aktif pada media massa, baik media elektronik, media cetak dan tentunya media online dalam mengikuti diskusi politik maupun kegiatan politik seperti kampanye. Kemudahan masyarakat mengakses segala jenis media sosial pada saat itu mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis informasi tentang politik. Perkembangan dinamika politik yang begitu dinamis juga bisa disimak secara langsung oleh masyarakat diseluruh pelosok negeri berkat kecepatan akses terhadap informasi. Terlebih berkaitan dengan dinamika politik nasional yang secara rutin menjadi konsumsi publik dari berbagai tontonan acara di televisi, terutama berkaitan dengan perkembangan isu-isu politik dan kebijakan publik.

¹⁵KPU Kota Pekanbaru, 2020

Pada Pemilu 2019, media berperan sangat penting dalam hal proses kampanye politik para calon yang berkontestasi. Berbagai jenis media sosial menjadi incaran bagi tim kampanye pemenangan digunakan sebagai arena sosialisasi sosok kandidat yang diusung. Untuk para pemilih milenial misalnya, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube menjadi referensi untuk menjaring gagasan atau ide-ide politik yang ditawarkan oleh para kandidat. Akumulasi dari berbagai informasi yang diperoleh kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik para pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan peranannya dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan bisa dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. Peran yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yaitu sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik, melakukan koordinasi dengan media lokal, dan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu di media massa dan media elektronik. Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru juga telah memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan melakukan mobilisasi sosial, memanfaatkan jejaring sosial, melaksanakan program rumah pintar pemilu, membentuk komunitas peduli pemilu dan demokrasi, serta membentuk agen relawan demokrasi. Sehingga antusiasme masyarakat meningkat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, sosialisasi yang diberikan partai politik, kampanye yang

dilakukan oleh peserta pemilu, serta adanya kerjasama dengan lembaga/pemerintah, TNI, dan Polri untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2019. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat kesadaran politik yang memiliki hubungan dalam penyelenggaran pemilihan langsung legislatif di kota Pekanbaru tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas maka diketahui bahwa kesadaran politik merupakan salah satu batu loncatan yang akan meningkatkan partisipasi politik terutama partisipasi dalam pemilihan umum. Dengan meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan umum legislatif di Kota Pekanbaru yang cukup signifikan dari pemilu legislatif tahun sebelumnya di angka peroleh 93,97% membuat kajian ini menarik untuk diteliti apakah memang faktor kesadaran politik yang tinggi yang menyebabkan angka tersebut naik secara drastis di Kota Pekanbaru atau tidak. Hal ini dikarenakan kesadaran politik merupakan salah satu faktor untuk mengukur tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu untuk menganalisis hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah hubungan antara tingkat kesadaran politik dengan tingkat partisipasi politik masyarakat di Kota Pekanbaru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan Tingkat Kesadaran Politik dengan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan kepada kalangan akademis serta dapat menjadi referensi untuk peneliti - peneliti selanjutnya dalam menambahkan pustaka ilmu pengetahuan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat untuk mengetahui serta memahami faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pekanbaru pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.

